

DA's
2/6-2021

**KINERJA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN REMBANG**

Muhammad Diding Setiawan¹, Sri Suwitri²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, H. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telpon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of implementing tasks related to human resource development, maintenance of household facilities and infrastructure, and implementation of budget management in the General and Finance Section of the Secretariat of the Rembang Regency DPRD. Public management focuses on resource management and improving performance to achieve organizational goals. Performance is measured through the achievement of work results, with indicators such as output, efficiency, and effectiveness. The purpose of this study is to analyze the performance of the General and Finance Section and identify supporting and inhibiting factors of performance using Agus Dwiyanto and Moeheriono's performance theory regarding productivity and accountability. Productivity is the result of the organization's work, while accountability is an obligation to be responsible for performance results. The method used is qualitative, with data collection through interviews, observations, and documentation studies. The results show that performance is quite good, although there are problems in human resource development and budget management. This study is expected to provide input for improving the performance of public organizations.

Keywords: Public Management, Performance, Productivity, Accountability

PENDAHULUAN

Menurut Dwight Waldo (1984), administrasi publik dapat dipahami sebagai proses manajemen dan pengorganisasian

sumber daya manusia serta peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Syafiic, 2010:24). Proses administrasi publik melibatkan berbagai

elemen, termasuk koordinasi antar berbagai lembaga, komunikasi yang efektif, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Woodrow Wilson (1887) menyoroti signifikansi pemisahan antara politik dan administrasi. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal dalam sektor publik, administrasi harus dikelola dengan cara yang efisien dan profesional. Menurutnya, pemisahan ini penting agar keputusan administratif tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas publik yang lebih efektif. Dalam pandangannya, profesionalisme dalam administrasi publik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang tinggi. Dengan demikian, Wilson menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya dan proses dengan baik, terlepas dari dinamika politik yang ada.

Nor Ghofur (2014) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah proses manajemen yang dijalankan oleh pemerintah, dengan fokus utama pada pengelolaan berbagai sumber daya serta peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi publik secara maksimal.

Manajemen publik tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan material, tetapi juga mencakup pengorganisasian, perencanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik dengan cara yang efektif. Manajemen publik juga harus mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja organisasi.

Dwight Waldo (1984) menjelaskan kinerja dalam administrasi publik dimana administrasi publik perlu memiliki kemampuan untuk mengelola kinerja secara efektif agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia berargumen bahwa keberhasilan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh cara di mana kinerja dikelola dan diukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi publik selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Selain itu, Dwight Waldo (1984) mencatat bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya.

Agus Dwiyanto (1995: 45) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja atau

tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, yaitu output, efisiensi, dan efektivitas. Konsep kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul Reformasi birokrasi Di Indonesia sendiri menjelaskan tentang penilaian kinerja yaitu suatu kegiatan dimana kegiatan ini dinilai penting karena bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi agar tercapai misi organisasi tersebut.

Moehariono (2012:95) menjelaskan bahwa kinerja atau *performance* adalah representasi dari tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja ini tercermin dalam bagaimana sebuah organisasi mengimplementasikan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, yang memiliki tujuan untuk mendukung adanya visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Rembang. Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yaitu Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang profesional, transparan dan akuntabilitas dalam

memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. Dan memiliki misi mewujudkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan; mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah secara cepat, tepat, tertib dan akurat untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD; dan mewujudkan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang profesional.

Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengawasi penggunaan sumber daya organisasi tetapi juga untuk mengukur efisiensi penggunaannya serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi kinerja merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan produktivitas staf. Bagian-bagian yang menunjukkan kinerja kurang optimal dapat diidentifikasi, memungkinkan pengembangan strategi untuk meningkatkannya.

Tabel 1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2023

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2023		
			T	R	C
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD	Indek Kepuasan Anggota DPRD	70	76,93	109

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja periode 2023, bahwa terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu 109. Penurunan indeks kepuasan anggota DPRD ini menggambarkan penurunan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah kerja yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan Pasal 19. Dimana Bagian Umum dan Keuangan memiliki 3 Subbagian yaitu:

- 1) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan DPRD
- 2) Subbagian Sarana dan Prasarana
- 3) Subbagian Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki tugas dan fungsi utama sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan 19 yaitu:

Tugas

1. Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara
2. Pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga
3. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan bidang tata usaha

Didalam pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terdapat persoalan. Dalam tugas Bagian Umum dan Keuangan pengembangan SDM aparatur sipil negara perlu adanya peningkatan hal ini bertujuan agar SDM aparatur sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki kompetensi lebih untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.

Sumber daya aparatur di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah menunjukkan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan di setiap divisi yang ada.

Meskipun jumlah tenaga kerja yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh bagian, kenyataannya, pendidik besar pegawai di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang masih berasal dari lulusan SLTA/SMA, dengan total mencapai 35 orang, perbedaan jenjang pendidikan tentu mempengaruhi didalam kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif sumber daya manusia sudah mencukupi, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan pegawai yang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terkait pemeliharaan sarana prasarana dan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kondisi sebagian sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Padahal sarana prasarana yang baik dan terawat merupakan faktor pendukung utama bagi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD kepada anggota Dewan dapat terhambat jika sarana prasarananya rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perlu penanganan segera

terhadap sarana yang rusak agar dapat berfungsi kembali sesuai standar. Selain itu, perlu peningkatan pengelolaan prasarana secara berkelanjutan melalui pemeliharaan rutin agar kualitas dan daya gunanya tetap terjaga.

Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022

Indikator	Nama Barang	Kondisi	Jml
1	2	3	4
1	PC Unit	Baik 34, RR 1, RB 19	54
2	Laptop	Baik	13
3	Note Book	Baik 7, RR 2	9
4.	Hard Disk	Baik	1
5.	Printer (Peralatan personel computer)	Baik 32, RB 9	41
6.	Scanner (Peralatan personel computer)	Baik 1, RR 3	4
7.	Camera elektronik	Baik	6
8.	Video monitor	Rusak Ringan	1
9.	Layar film/proyektor	Baik 21, RB 3	24
10.	Telephone mobile	Baik 53, RR 1, RB 43	97
11.	Facsimile	Baik	1
12.	Peralatan Antena SHF/ Parabola Lain - lain	Baik	6
13.	Receiver STL/SHF	Baik 12, RB 7	19

Sumber: Penelitian Terdahulu

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/42422/30485>

Selanjutnya terkait tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD untuk membantu pelayanan administrasi DPRD masih belum optimal. Belum optimalnya efisiensi penggunaan sumberdaya Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2023. Pada tabel dibawah

efisiensi penggunaan sumberdaya untuk Jumlah bintek ASN baru terealisasi 80% dari target sebesar 96%, jika dibandingkan dengan data tahun 2022 maka efisiensi penggunaan sumberdaya mengalami penurunan dimana tahun 2022 efisiensi penggunaan sumberdaya terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022 dan 2023

No	Tujuan/Sasaran	Tahun 2022			2023		
		T	R	C	T	R	C
1.	Terpenuhinya Pengelolaan keuangan	80%	80%	100%	96%	96%	100%
2.	Jumlah bintek ASN	100%	100%	100%	96%	80%	83%
3.	Tercukupinya perlengkapan kantor	90%	90%	100%	96%	80%	83%

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Dengan permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD perlu adanya solusi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sejalan dengan itu Agus Dwiyanto (2017:50-51) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mendukung atau menghambat kinerja, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, dari pendapat Meoheriono (2012:95) bahwa sasaran, tujuan, serta visi dan misi dari organisasi

juga dapat berfungsi sebagai faktor pendukung kinerja. Dengan menetapkan sasaran yang jelas dan realistis, serta visi dan misi yang inspiratif, organisasi dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama Sesuai dengan kondisi lapangan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja Bagian Umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah produktivitas dan akuntabilitas. Produktivitas.

Produktivitas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah hasil kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bagian Umum dan keuangan di Tahun 2023. Sedangkan akuntabilitas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah suatu kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum dan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara transparan dan terukur kepada anggota DPRD kabupaten Rembang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kinerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan dan menganalisis kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan secara *Purposive Sampling* dan *Random Sampling*. Data penelitian ini diperoleh dari subjek atau informan yang mengerti tentang Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti dapat memilih sampel secara terfokus dan tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditentukan

peneliti sebelumnya. Kriteria tersebut berguna untuk memilih sampel yang paling relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja

Untuk mengetahui permasalahan mengenai Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, penulis menetapkan indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021.

a. Tugas

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021 dalam pasal 18, tugas pokok dari Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yaitu pengembangan SDM aparatur sipil negara, pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga, dan pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1. Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara

Dalam hal SDM yang dimiliki oleh Bagian Umum dan Keuangan masih didominasi oleh lulusan SLTA/Scdrajat yang berjumlah 35 orang, sedangkan untuk lulusan S1 sebanyak 3 orang, dan S3 2 orang, maka dari itu dilakukan pengembangan SDM yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para staf yang ada. Strategi dalam pengembangan SDM di Bagian Umum dan Keuangan adalah dengan melakukan BIMTEK, dengan memberangkatkan staf mengikuti BIMTEK akan membuat staf mendapatkan tambahan pengetahuan administrasi agar bisa mendukung segala bentuk administrasi dari DPRD Kabupaten Rembang.

2. Pemeliharaan Sarana Perlengkapan dan Rumah Tangga

Yang bertugas dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah Subbagian Sarana dan Prasarana. Kondisi sarana perlengkapan ada sebagian mengalami kerusakan pada printer yang mengalami rusak ringan sebanyak 2 unit, scanner juga mengalami kerusakan ringan sebanyak 2 unit. Ketika terjadi kerusakan akan langsung dilakukan perbaikan agar kerusakan sarana perlengkapan tidak mengganggu kinerja staf, perbaikan juga dilakukan tidak menggunakan prosedur yang ada karena menurut informan hal tersebut membuat tidak efisien waktu karena perlu membuat laporan sebelum

melakukan perbaikan, sehingga diambil langkah perbaikan awal selanjutnya dalam proses perbaikan baru dilaporkan kepada atasan yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan atas perbaikan yang dilakukan dan berapa dana yang dibutuhkan dalam perbaikan tersebut.

Tabel 4 Kerusakan Sarana dan Prasarana di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2023

No.	Nama Barang	Kondisi	Jumlah
1	2	3	4
1	PC Unit	Baik	28
2	Laptop	Baik	10
3	Note Book	Baik	9
4.	Hard Disk	Baik	1
5.	Printer (Peralatan personel computer)	Baik 13, RR 2	15
6.	Scanner (Peralatan personal computer)	Baik 2, RR 2	4

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

3. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD

Yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi dalam penyerapan anggaran adalah keterlambatan pencairan dana oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini bisa mempengaruhi kinerja Bagian Umum dan Keuangan dalam memberikan pelayanan pendukung kegiatan DPRD, dalam mengatasi kendala ini Bagian Umum dan Keuangan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dalam kordinasi ini pihak Bagian Umum dan

Keuangan akan melakukan pemantauan secara berkala agar proses pencairan anggaran bisa segera dilakukan,

Bagian Umum dan Keuangan juga melakukan perencanaan anggaran lebih awal untuk menyesuaikan anggaran karena potensi keterlambatan pencairan anggaran, hal ini bertujuan agar permasalahan keterlambatan pencairan anggaran mampu ditangani seawal mungkin. Dengan demikian bahwa pihak Bagian Umum dan Keuangan dapat menyelesaikan kendala yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya terkait pengelolaan pelaksanaan anggaran dengan baik.

b. Fungsi

Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi-fungsi yang diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 19 dimana fungsi pokok dari Bagian Umum dan Keuangan yang pertama yaitu penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan yang kedua pelaksanaan bidang tata usaha. Kedua fungsi ini sangat penting bagi Bagian Umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam memberikan layanan kepada DPRD.

1. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki fungsi yaitu menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis, bahan tersebut mencakup beberapa laporan penting:

- 1) Laporan Alokasi Anggaran: Digunakan untuk menilai realisasi penggunaan anggaran.
- 2) Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Menyediakan informasi terkait kondisi fasilitas yang ada.
- 3) Laporan Pengoperasian Aplikasi Surat Menyurat: Menggambarkan efektivitas sistem administrasi.
- 4) Laporan Kinerja Bagian Umum dan Keuangan: Menyajikan evaluasi kinerja Bagian umum dan Keuangan.

Dalam proses ini, Sekretaris Dewan berkolaborasi dengan Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian. Mereka mengadakan diskusi untuk mengevaluasi dan mengumpulkan laporan yang diperlukan. Misalnya, Sekretaris Dewan dapat meminta Kepala Subbagian untuk mengkoordinasikan stafnya dalam menyerahkan laporan alokasi anggaran dan laporan kinerja, yang kemudian akan dibahas dalam rapat untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan Bidang Tata Usaha

Dalam menjalankan fungsi pelaksanaan bidang tata usaha Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli, dan Keanggotaan DPRD telah

memastikan pelaksanaan bidang tata usaha berjalan dengan efektif. Terkait pelaksanaan fungsi pelaksanaan dibidang tata usaha tersebut, informan telah menjelaskan bahwa pengelolaan surat dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus bernama "Sim Surat." Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi semua surat yang masuk dan keluar, serta memastikan bahwa setiap surat telah diproses dan disetujui oleh Sekretaris Dewan.

Gambar 1 Aplikasi Sim Surat



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

a. Produktivitas

Produktivitas berperan sebagai faktor yang mendukung sekaligus menghambat kinerja di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Menurut Dwiyanto (2017:50),

produktivitas tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada aktivitas pelayanan yang dilakukan. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai rasio antara output dan input yang dihasilkan yaitu pelayanan kepada anggota DPRD.

1. Program Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kinerja di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur sipil negara menjadi sangat penting. Dengan pelaksanaan pengembangan SDM yang terstruktur dan teratur, kinerja di Bagian Umum dan Keuangan dapat dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Program pengembangan ini dirancang untuk memberikan tambahan kompetensi kepada staf, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anggota DPRD. Sesuai dengan pendapat Agus Dwiyanto (2017), produktivitas dalam konteks kinerja Bagian Umum dan Keuangan tidak hanya diukur dari tingkat efisiensi, tetapi juga dari aktivitas layanan yang diberikan, untuk melakukan pelayanan yang optimal tentu saja diperlukan staf yang berkompeten dan program pengembangan SDM berguna untuk meningkatkan kompetensi staf.

Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan program pengembangan SDM setiap tahun. Program ini mencakup pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis di berbagai bidang, termasuk Kehumasan, Protokol, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH). Selain itu, program ini juga melibatkan partisipasi pihak luar, seperti perusahaan swasta atau lembaga pelatihan, yang berkontribusi dalam penyediaan pelatihan.

Meskipun program ini memiliki tujuan yang jelas, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala. Staf yang mengikuti pelatihan sering kali harus meninggalkan tugas harian mereka, yang dapat menambah beban kerja bagi rekan-rekan yang harus mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, kendala dalam koordinasi dengan pihak luar, seperti ketidaksesuaian jadwal pelatihan atau kurangnya fasilitas yang memadai, dapat menghambat efektivitas dari program pengembangan SDM ini.

2. Perbaikan Kerusakan Sarana Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sarana yang memadai dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk menjamin kelancaran serta efisiensi layanan yang diberikan kepada DPRD. Di sisi lain, kerusakan pada sarana dan

prasarana dapat mengganggu aktivitas staf dan berpotensi menurunkan tingkat produktivitas secara keseluruhan. Agus Dwiyanto (2017) menjelaskan bahwa kualitas layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Ketika terjadi kerusakan pada sarana, perbaikan yang cepat dan efektif sangat diperlukan untuk menjaga kinerja layanan kepada DPRD, sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu.

Menurut Mochariono (2012) bahwa kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, terkait perbaikan kerusakan sarana perlengkapan tujuan dan sasaran perbaikan adalah untuk memastikan kinerja Bagian Umum dan Keuangan dapat berjalan dengan lancar, sehingga produktivitas kinerja tetap terjaga. Perbaikan harus segera dilakukan saat kerusakan terjadi, dengan waktu yang diperlukan untuk perbaikan tergantung pada tingkat kerusakan sarana dan prasarana tersebut.

3. Laporan Alokasi Anggaran

Terkait dengan alokasi anggaran informan memberikan penjelasan bahwa pihak Bagian Umum dan Keuangan terus berupaya meningkatkan produktivitas dalam alokasi anggaran agar semua anggaran bisa terserap secara optimal. Agus Dwiyanto (2017) sendiri telah menjelaskan

bahwa produktivitas tidak hanya tentang tingkat efisiensi namun juga aktivitas layanan dimana dalam hal alokasi anggaran di Bagian Umum dan keuangan maka produktivitas diukur dari sejauh mana alokasi anggaran yang menunjang layanan yang diberikan kepada DPRD dapat optimal.

Dari LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dimana data efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa realisasi bimbingan teknis untuk ASN baru mencapai 80% dari target 96%. Pencapaian alokasi untuk perlengkapan kantor juga berada di angka 80%, sementara penambahan aset BMD baru mencapai 50%. Menurut Moheriono (2012) hal yang dapat mempengaruhi kinerja adalah tingkat penerapan sasaran atau target.

Tabel 5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator			Anggaran		
		T	R	C	Anggaran	Rcalisasi	Capaian
1.	Jumlah bimbingan teknis ASN	96 %	80 %	83 %	230.850.000	111,501.405	48
2.	Tercukupinya perlengkapan kantor	96 %	80 %	83 %	608,104.000	398.049.128	65
3.	Tambahan Aset BMD	96 %	50 %	52 %	49,780.000	9,188.000	18

4.	Terpe-nuhin ya jasa kantor	96 %	96 %	100 %	831,241.000	656,351.712	78
5.	BMD Kondisi Baik	96 %	96 %	100 %	807,274.000	554,530.403	68

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2023

4. Proses Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis

Agus Dwiyanto (2017) dalam konteks proses penyiapan bahan kebijakan teknis tingkat produktivitas dilihat dari pelaksanaan penyiapan bahan yang dilakukan dengan baik. Dengan tersedianya bahan-bahan tersebut, terlihat adanya peningkatan produktivitas di Bagian Umum dan Keuangan, yang mencerminkan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan efektif. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Rembang.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan akan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian dalam menyiapkan bahan perumusan. Koordinasi ini juga mencakup kerja sama dengan Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana untuk memastikan fasilitas yang diperlukan tersedia saat rapat pembahasan kebijakan teknis. Selain itu, Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana diminta untuk menyusun

laporan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan juga meminta laporan keuangan terkait alokasi dan realisasi anggaran yang sangat penting untuk mengevaluasi apakah target alokasi telah tercapai dan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses realisasi anggaran. Selain itu, laporan kinerja dari bidang tata usaha, yang mencakup pengelolaan surat-menyurat di Sekretariat, juga diminta dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli, dan anggota DPRD. Semua laporan ini, termasuk kinerja Bagian Umum dan Keuangan, kemudian diserahkan kepada Sekretaris Dewan untuk dibahas lebih lanjut dalam perumusan kebijakan teknis.

Hal ini juga sejalan dengan teori Moehariono (2012) dimana kinerja dipengaruhi dari tingkat pencapaian target dan sasaran, dimana dalam konteks proses penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis, kinerja dilihat dari pelaksanaan pencapaian sasaran atau target yang berguna meningkatkan produktivitas kinerja bagian Umum dan Keuangan dalam proses penyiapan bahan perumusan.

5. Program Pembinaan Bidang Tata Usaha

Dalam produktivitas kinerja di bidang tata usaha Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli, dan Keanggotaan DPRD Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan arsip, terutama dalam mengelola surat masuk dan keluar melalui aplikasi digital bernama "Sim Surat." Efektivitas aplikasi ini sangat bergantung pada kemampuan staf dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, pembinaan yang memadai bagi para staf sangat diperlukan, mencakup aspek teknis pengoperasian serta penanganan masalah yang mungkin muncul saat aplikasi mengalami kendala. Agus Dwiyanto (2017) menjelaskan bahwa produktivitas tidak hanya diukur dari tingkat efisiensi namun juga dari aktivitas layanan dalam konteks program pembinaan di bidang tata usaha, pembinaan dilakukan untuk mendorong kualitas layanan pada bidang tata usaha yaitu penggunaan aplikasi Sim Surat yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja.

Pembinaan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional aplikasi, tetapi juga memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan produktivitas kerja di Subbagian tersebut. Moehariono (2012) bahwa kinerja adalah gambaran dari tingkat pelaksanaan tujuan

dan sasaran, dalam pembinaan dibidang tata usaha tujuan dan sasaran dari pembinaan adalah meningkatkan kompetensi staf agar mampu mendorong produktivitas kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Dengan pembekalan yang tepat, diharapkan staf tidak hanya mampu menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul di masa depan.

b. Akuntabilitas

Agus Dwiyanto (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah seberapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dalam konteks kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah suatu kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum dan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara transparan dan terukur kepada anggota DPRD kabupaten Rembang. Dengan penerapan akuntabilitas yang baik dan konsisten oleh seluruh staf di Bagian Umum dan Keuangan.

1. Pengawasan Program Pengembangan SDM

Pengawasan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas untuk memastikan bahwa kegiatan yang dirancang dapat meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme staf. Agus Dwiyanto (2017) bahwa akuntabilitas dalam konteks pengawasan program pembinaan SDM adalah bentuk tanggungjawab atas peningkatan kompetensi staf yang mampu menunjang kinerja organisasi. Tindakan pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan tujuan menjaga efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian hasil yang diharapkan.

Pengawasan program pengembangan SDM telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Proses pengawasan mencakup:

- 1) Identifikasi Staf: Penentuan staf yang perlu ikut serta dalam program.
- 2) Jadwal Program: Pengaturan waktu pelaksanaan program.
- 3) Anggaran: Pengelolaan anggaran yang digunakan untuk program.
- 4) Dampak Program: Evaluasi dampak program terhadap kompetensi staf.
- 5) Hambatan: Identifikasi dan penanganan hambatan dalam pelaksanaan program.

Frekuensi kegiatan pengembangan SDM perlu ditingkatkan dari 2-3 kali setahun menjadi 4 kali, agar lebih optimal dalam meningkatkan kompetensi staf. Agus Dwiyanto (2017) terkait pengawasan program pembinaan SDM bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk menggali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan, dengan penjelasan Kepala Bagian Umum dan Keuangan bertanggung jawab dari pihak Bagian Umum dan keuangan dalam memenuhi kebutuhan dalam program pengembangan adalah dengan meningkatkan frekuensi dari program pengembangan tersebut sehingga program mampu menjamin kebutuhan dari staf.

Sebagai staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, setiap pelaksana diharapkan dapat berupaya maksimal untuk mencapai target. Moehariono (2012) bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian visi dan misi dimana dalam pengawasan program pembinaan Bagian Umum dan Keuangan adalah untuk mendukung visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam mendukung Kegiatan dan memberikan layanan kepada DPRD. Ketidakmampuan memenuhi target tidak hanya mencerminkan kurangnya efektivitas kerja, tetapi juga dapat

berdampak negatif pada evaluasi kinerja dan berpotensi menimbulkan sanksi.

2. Evaluasi Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Evaluasi program pemeliharaan sarana dan prasarana di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang merupakan bentuk akuntabilitas kinerja untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur yang ada dikelola dengan baik. Agus Dwiyanto (2017) dalam konteks evaluasi program pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu bentuk tanggungjawab Bagian Umum dan Keuangan dalam mendukung kegiatan DPRD.

Terdapat laporan berkala mengenai kondisi sarana dan prasarana sangat krusial. Laporan ini mencakup:

- 1) Kondisi Fasilitas
- 2) Anggaran Pemeliharaan
- 3) Kesiapan Operasional

3. Evaluasi Realisasi Anggaran

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Agus Dwiyanto (2017) bahwa akuntabilitas realisasi anggaran adalah bentuk tanggungjawab dari organisasi dalam mengelola anggaran yang ada.

Evaluasi realisasi anggaran bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tahapan evaluasi realisasi anggaran mencakup beberapa langkah penting yaitu:

- 1) Perencanaan Evaluasi: Langkah awal adalah menentukan aspek mana dari realisasi anggaran yang akan dievaluasi, seperti anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana atau program pelatihan (BIMTEK). Perencanaan yang jelas sangat penting untuk fokus terhadap tujuan evaluasi.
- 2) Analisis Data Laporan Keuangan: Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data laporan keuangan dan alokasi anggaran. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah anggaran telah memenuhi target yang ditentukan. Jika tidak, perlu diidentifikasi penyebabnya.
- 3) Identifikasi Kendala: Jika ditemukan kendala dalam realisasi anggaran, evaluasi dilanjutkan untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Ini penting untuk memahami apa yang menghambat pencapaian target dan bagaimana cara mengatasinya.
- 4) Hasil Evaluasi: Setelah analisis dan identifikasi masalah, hasil evaluasi

akan menunjukkan apakah realisasi anggaran sudah baik atau perlu perbaikan. Hasil ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya.

- 5) Penerapan Hasil Evaluasi: Terakhir, hasil evaluasi harus diterapkan dalam bentuk penanganan kendala-kendala yang ada. Ini termasuk penyesuaian alokasi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak berdasarkan skala prioritas.

4. Pengawasan Proses Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis

Pada proses penyiapan bahan kebijakan teknis memang memerlukan pengawasan yang ketat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari Bagian Umum dan Keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua langkah dalam penyiapan kebijakan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan bahwa kinerja staf berada pada level optimal. Mocheriono (2012) kinerja adalah gambaran pencapaian dari visi dan misi, dimana Bagian Umum dan Keuangan mendukung keberhasilan visi dan misi Sekretariat DPRD sebagai pembantu kegiatan DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan teknis dimana bentuk akuntabilitas kinerja dengan melakukan pengawasan dalam proses penyiapannya.

Pengawasan dalam penyiapan bahan kebijakan merupakan kegiatan yang tidak bisa diabaikan. Sebelum pembahasan kebijakan teknis, Kepala Bagian Umum dan Keuangan harus berkoordinasi dengan setiap Kepala Subbagian. Ini penting agar setiap staf memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses penyiapan. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan penyiapan bahan kebijakan dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu, sehingga laporan yang diperlukan dapat diserahkan untuk pembahasan kebijakan. Agus Dwiyanto (2017) terkait pengawasan dalam proses penyiapan bahan kebijakan responsivitas, Bagian Umum dan Keuangan adalah memahami dan menggali kebutuhan DPRD untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bentuk akuntabilitas dengan melakukan pengawasan agar proses penyiapan dapat berjalan dengan baik.

5. Evaluasi Pembinaan Bidang Tata Usaha

Dengan melakukan evaluasi, pihak Bagian Umum dan Keuangan dapat mengidentifikasi dampak dari pembinaan serta mengukur kompetensi staf yang perlu ditingkatkan. Evaluasi dalam pembinaan di bidang tata usaha adalah bentuk akuntabilitas pihak Bagian Umum dan Keuangan untuk memantau jalannya pembinaan di bidang tata usaha. Agus Dwiyanto (2017) bahwa responsibilitas

adalah memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip administrasi dimana salah satu prinsip administrasi adalah akuntabilitas di dalamnya tertatad transparansi dan tanggung jawab pada kinerja.

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli, dan Keanggotaan DPRD memiliki tanggung jawab utama dalam evaluasi pembinaan ini. Sebagai Kepala Subbagian, mereka harus memastikan bahwa program pembinaan berjalan dengan semestinya. Informan menekankan pentingnya evaluasi terhadap kompetensi staf, sehingga program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kemampuan yang relevan. Informasi dari evaluasi ini akan disusun dalam laporan yang kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan untuk memberikan gambaran tentang kemajuan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan melalui hasil wawancara dengan informan menganalisis sumber tertulis, dokumentasi. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian diatas

1. Pengembangan SDM: Terdapat tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, terutama dominasi pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA/Sederajat. Upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK).

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Pada pemeliharaan sarana dan prasarana pihak Bagian Umum dan Keuangan langsung melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan sarana prasarana, hal ini untuk memastikan semua sarana prasarana dalam kondisi yang baik ketika akan digunakan.
3. Pengelolaan Anggaran: Pengelolaan pelaksanaan anggaran menghadapi kendala, terutama terkait keterlambatan pencairan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait sangat penting untuk memperlancar proses ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki pada pelaksanaan kinerja Bagian Umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Berikut saran yang dapat dilakukan oleh Bagian Umum dan

Keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Rembang, yaitu:

1. Peningkatan Program Pengembangan SDM: Disarankan untuk memperluas program bimbingan teknis (BIMTEK) dengan frekuensi yang lebih tinggi, misalnya dari 2-3 kali setahun menjadi 4 kali. Hal ini dapat membantu staf untuk terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuan yang relevan.
2. Optimalisasi Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Perlu disusun prosedur pemeliharaan yang lebih efisien agar perbaikan sarana dan prasarana dapat dilakukan tanpa mengabaikan langkah-langkah administratif. Ini akan membantu memastikan fasilitas selalu dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja.
3. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten mengenai pencairan dana. Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan yang dapat mengganggu kegiatan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Muharam, S. (2023). Performance Of Regional People's Representative Council Secretariat Apparatus Murung Raya District. *International Journal of Political, Law, and Social Science*, 4(1), 67–83.
- Amalia, H. R., & Sumiati, S. (2022). Pelayanan Dan Target Kinerja Sumber. *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, September, 630–644.
- Aminudin, A. (2024). The Role of the Council Secretariat in Supporting DPRD Performance Central Bengkulu Regency for the 2019 - 2024 period. *INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND PUBLIC ADMINISTRATION*, 5(1).
- Anirwan, A., & Annas, A. (2020). Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 131–150. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.61>
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 1–16. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/192/140>
- Arifin, Z., Sukowati, P. dan, & Hariyanto, T. (2020). The Role of Employees of the DPRD Secretariat in Serving and Supporting the Implementation of Duties and Functions of the DPRD in East Kutai District. *Social Science*, 2017, 5–6.
- Athaya Arla Arthania, Herbasuki Nurcahyanto, S. S. (2021). Implementasi Kebijakan Core Values Dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan. *E-Journal Undip*, 13.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Dwi Afri Liana, R. S. S. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PASAR BLORA KOTA). *E-Journal Undip*, 14(2), 88–100. <http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKA>
- A
- Kencana Syafie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nor, Ghofur. (2014). *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Jakarta: Bumi Angkasa
- NOYA, A. W., TULUSAN, F. M. ., & TAMPONGANGOY, D. L. (2021). Kinerja Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Utara. *JAP (Jurnal Administrasi Publik)*, VII(102), 29–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35067/32849>
- Nur, W. S., Meigawati, D., Sampurna, R. H., Studi, P., Administrasi, I., Universitas, P., Sukabumi, M., Manusia, S. D., Birokrasi, R., & Indonesia, R. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

Administrasi Negara, 7(2), 364–376.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Pemerintah Kabupaten Rembang. (2021). Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 53 Tahun 2021.

Ramto, Bun Yamin. 1997. Inovasi Kebijakan Public Sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sisial dan Global. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Pendidikan.

Rembang, S. D. K. (2023). LKJIP SETWAN Tahun 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, S. Dprdk. (2024). Rencana Kerja. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG, 1–33. <https://disbudpar.acchprov.go.id/ppid/>

Wilson, Woodrow. (1887).The study of Administration. Political Science Quaterly, Vol 2. No. 2.